

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PENARIKAN  
PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PT. ASTRA CREDIT  
COMPANIES KOTA PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Strata Dua (S2)  
Magister Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas*

**Diajukan Oleh:**



**Pembimbing:**

**Prof. Dr. Busyra Azheri, SH., MH**

**Dr. Muhammad Hasbi, SH., MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PENARIKAN  
PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PT. ASTRA CREDIT  
COMPANIES KOTA PADANG**

(Fajri Hasrul, NIM. 1920123043, Program Studi Magister Kenotariatan  
Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2023, 118 halaman)

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan fidusia masih dianggap lemah. Dalam sebuah perjanjian pembiayaan, kreditur memiliki posisi tawar yang lebih kuat dari debitur, sehingga debitur dianggap lebih membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum dibandingkan kreditur. Dalam kenyataannya, sering terjadi debitur merupakan pihak yang melakukan cedera janji dan tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasinya dengan melanggar klausul-klausul yang ada dalam perjanjian pembiayaan. Sebagai tindakan untuk menghindari kerugian perusahaan akibat wanprestasi oleh debitur, perusahaan pembiayaan melakukan penarikan terhadap objek jaminan, termasuk penarikan secara paksa. Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui dan menganalisis penarikan paksa yang dilakukan oleh PT. ACC Cabang Padang dan permasalahan permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam proses penarikan paksa objek jaminan. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian *juridis-empiris*. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari *key informant* yang berada di PT. ACC Cabang Padang dan data sekunder yang berasal dari sumber-sumber rujukan hukum. Dari hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa Undang Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 merupakan bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur. Upaya perlindungan hukum kreditur pada perjanjian jaminan fidusia harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 11 dan pasal 12 UUJF. UUJF juga memberikan kepastian hukum pada kreditur untuk melakukan penarikan terhadap objek jaminan jika debitur wanprestasi, secara parate eksekusi sesuai dengan pasal 15 UUJF. Ketegasan dalam eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa juga telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bahwa penarikan paksa dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Hasil penelitian di ACC Cabang Padang menemukan bahwa penarikan paksa yang dilakukan berdasarkan dua kasus yang dianalisis sudah dilakukan sesuai persyaratan yang di sebutkan dalam UUJF dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan dua kasus ini debitur telah melakukan wanprestasi dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Penelitian ini menemukan bahwa debitur telah melanggar pasal 23 UUJF, dengan melakukan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Sesuai dengan UUJF, dalam kasus ini kreditur tidak hanya dapat melakukan penarikan, tapi debitur juga dapat dipidanakan sesuai pasal 36 UUJF.

**Kata Kunci:** Jaminan Fidusia, kepastian hukum, kreditur, penarikan paksa, perlindungan hukum

# LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS IN FORCED WITHDRAWAL OF FIDUCIARY COLLATERAL OBJECTS AT PT. ASTRA CREDIT COMPANIES, PADANG CITY

## ABSTRACT

Legal protection for creditors in fiduciary guarantees is still considered weak. In a financing agreement, the creditor has a stronger bargaining position than the debtor, so the debtor needs legal certainty and protection more than the creditor. In reality, it often happens that the debtor is the party who defaults and does not have the good faith to fulfill his achievements by violating the clauses in the financing agreement. Finance companies withdraw collateral objects, including forced withdrawals, to avoid corporate losses due to debtors' defaults. This study aims to identify and analyze forced withdrawals carried out by PT. ACC Padang Branch and the problems faced by the company in the process of forcibly withdrawing collateral objects. This research was conducted by juridical-empirical research. The data source for this research is primary data from key informants at PT. ACC Padang Branch and secondary data derived from legal reference sources. From the research results, the Fiduciary Guarantee Law number 42 of 1999 is a form of certainty and legal protection for creditors. Efforts to protect the creditor's law in a fiduciary guarantee agreement must meet the requirements of Articles 11 and 12 of the UUJF. UUJF also provides legal certainty to creditors to withdraw collateral objects if the debtor defaults by execution under Article 15 UUJF. Strictness in the execution of forced fiduciary guarantees has also been regulated in the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 decision that forced withdrawals can be carried out by fulfilling predetermined conditions. The research results at the ACC Padang Branch found that the forced withdrawals based on the two cases analyzed had been carried out according to the requirements stated in the UUJF and the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. Based on these two cases, the debtor has defaulted and has no good faith to settle his obligations. This study found that the debtor had violated Article 23 UUJF by transferring the collateral object without the creditor's approval. Following UUJF, in this case, the creditor can not only be allowed to withdraw but the debtor can also be punished according to Article 36 UUJF.

**Keywords:** creditors, fiduciary guarantees, legal certainty, legal protection